

# **RENCANA KERJA 2020**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS KESEHATAN  
JL. Panglima Sudirna No. 403 Telp. 0335 841160  
KRAKSAAN -PROBOLINGGO-67282**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Renja Dinas Kesehatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renja Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Dinas Kesehatan adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yaitu Dinas Kesehatan, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen Renja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran



dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dinas ini mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT ) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
5. Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional Dinas Kesehatan
6. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sebagai suatu instansi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dengan berpijak pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai Tujuan



sesuai Renstra 2018-2023 yaitu : "Meningkatkan Kualitas Kesehatan Melalui Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan".

Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo selama periode 2018-2023 untuk berusaha mewujudkan harapan-harapan yang akan dicapai sesuai dengan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dengan berpijak pada tujuan yang telah dicanangkan, secara lebih jelas terurai dalam sasaran Renstra Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan;
2. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja OPD, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- j. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
- m. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023. Program dan kegiatan dalam renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Renja SKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala OPD. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan mangacu pada ketentuan target kinerja pada *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kab. Probolinggo dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas dan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD
  - 6.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
  - 6.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
  - 6.3 Program dan Kegiatan Usulan 2019
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V : Penutup



**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang diuraikan dalam Lampiran 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD dan capaian kinerja tiap program dan kegiatan, antara lain:

**Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018**

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Alokasi Biaya				Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sum ber Dana	Uraian	Target	Realisa si	%
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.448.976.500</b>	<b>4.345.825.122</b>	<b>97,68</b>					
1.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	80.000.000	79428.000	99,29	DAU	Terlaksananya penyediaan jasa pihak ketiga cleaning servis di Dinas Kesehatan	1 paket/ 12 bulan		100
1.2	Penyediaan jasa tenaga non PNS	3.523.100.000	3.499.950.000	99,34	DAU	Terlaksananya pembayaran honor non PNS di Dinkes, Puskesmas dan Jaringannya	199 orang		109
1.3	Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	89.400.000	187.828.711	83,54	DAU	Terlaksananya pembayaran honor tenaga pengelola keuangan dan pengelola barang Dinkes	15 org		100
1.4	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	224.830.000	182.674.211	81,84	DAU	Terlaksananya pembayaran tagihan rutin Dinkes, GFK dan Labkesda	6 paket (listrik, telepon, air, internet, STNK)		100
1.5	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	551.646.500	489.268.411	92,03	DAU	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan kegiatan rutin bidang sekretariat	7 paket		100
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>471.650.000</b>	<b>449.460.797</b>	<b>95,30</b>					
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	320.950.000	319.093.399	99,42	PAD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/servis sarpras dinkes, pemeliharaan rutin gedung kantor	45 unit, 13 paket, 4 paket	60 unit, 11 paket, 3 paket	100
2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	150.700.000	130.367.398	86,51	PAD & DAU	Terlaksananya prasarana peralatan kantor yang memadai	4 paket	26 unit	100
<b>3</b>	<b>Program</b>	<b>304.250.000</b>	<b>263.924.134</b>	<b>86,75</b>					



RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>								
3.1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	139.250.000	99.950.000	71,78	PAD	Terlaksananya penyediaan tenaga akuntansi dinkes	2 orang/12 bulan	2 orang/6 bulan	100
3.2	Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pelaporan Kinerja SKPD	80.000.000	79.798.000	99,75	PAD	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana program, evaluasi sinkronisasi kegiatan SKPD dan bimtek rencana kerja 2018	5 dokumen, 1 paket	7 dokumen, 3 kali, dan 1 paket	100
3.3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	85.000.000	84.176.134	99,03	DAU	Terlaksananya rekonsiliasi barang aset dan persediaan, Terlaksananya pembayaran honor pengelola aset dinkes	33 pkm/12 kali, 3 orang	33 pkm/14 kali	100
<b>4</b>	<b>Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>17.807.410.000</b>	<b>17.403.839.901</b>	<b>97,73</b>					
4.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.040.000.000	4.877.620.007	96,78	DAU & DAK	Terlaksananya rapat perencanaan dan kebutuhan obat terpadu serta pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	33 org dan 1 paket	33 org dan 1 paket	100
4.2	Manajemen Pengelolaan Obat	100.000.000	97.848.250	97,85	PAD	Terlaksananya validasi manajemen pengelolaan obat puskesmas, rapat perencanaan kebutuhan obat, validasi data dasar kefarmasian serta penerapan pelayanan kefarmasian	33 pkm, 33 org, 33 pkm, 16 pkm	33 pkm, 33 org, 33 pkm, 16 pkm	100
4.3	Pengadaan obat dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	850.000.000	838.682.000	98,67	PAD	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan rawat inap dan persalinan JKN puskesmas	33 pkm	33 pkm	100
4.4	Pengadaan Alat Kesehatan	10.033.400.000	10.026.167.740	99,93	BANPR OV	Terlaksananya pengadaan alkes	33 pkm	33 pkm	100
4.5	Pengawasan Keamanan Pangan, obat dan bahan berbahaya	100.000.000	95.796.486	95,80	PAD	Terlaksananya pemeriksaan sampel makanan, monitoring pangan di masyarakat serta penyebaran informasi keamanan pangan	6 paket, 10 lokasi, 20 org, 5 kali	6 paket, 10 lokasi, 20 org, 5 kali	100
4.6	Peningkatan kualitas alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100.000.000	90.302.488	90,30	PAD	Terlaksananya Peningkatan kualitas alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	33 pkm	33 pkm	100
4.7	Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota	1.584.010.000	1.377.422.970	86,96	DAK	Terlaksananya Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi	1 Gudang IFK	1 Gedung IFK	100
<b>5</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>8.201.900.500</b>	<b>5.579.965.567</b>	<b>68,03</b>					
5.1	Perbaikan Gizi Masyarakat	399.000.000	286.886.650	71,90	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan gerakan SAPA HATI BUNDA,	300 orang, 5 paket, 2700 kasus,	300 orang, 5 paket, 2700	100





RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

						kegiatan PMT pendampingan kasus kurang gizi oleh kader PMBA, susu khusus balita HIV/AIDS, susu khusus balita kurang gizi	765 dos, 1575 dos	kasus, 765 dos, 1575 dos	
5.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	800.000.000	678.621.000	71,90	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegiatan kapasitas pelaksana kegiatan KIA	8 paket, 5 paket	7 paket, 4 paket	90
5.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia dan Remaja	3.700.000.000	3.639.521.400	98,37	DAU dan Pajak Rokok	Terlaksananya peningkatan kapasitas Guru BK, kegiatan gebyar lansia, pemberian PMT susu lansia	132 orang, 4 paket, 375 orang, 44550 dos	132 orang, 4 paket, 375 orang, 44550 dos	100
5.4	Peningkatan deteksi ibu hamil	164.486.500	152.961.500	92,99	BAN PROP DID	Terlaksananya ibu hamil yang dilakukan pendampingan	200 ibu hamil	200 ibu hamil	100
5.5	Jaminan Persalinan Puskesmas	3.138.414.000	821.975.017	26,19	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan sosialisasi jampersal, kegiatan operasional makan RTK dan jaminan persalinan bagi ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan	131 orang, 10 paket 1 paket	45orang, 3 paket 0 paket	35
<b>6</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>3.012.154.000</b>	<b>2727.480.450</b>	<b>90.55</b>					
6.1	Pembinaan taman posyandu	225.000.000	216.486.000	96,22	BAN PROP	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kecamatan, rapat koordinasi tingkat kabupaten,	600 orang, 50 orang, 210 orang, 1 paket, 660 orang	600 orang, 50 orang, 210 orang, 1 paket, 660 orang	100
6.2	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.150.000.000	1.095.023.550	95,22	Pajak Rokok	Terlaksananya pertemuan koordinasi promkes, sosialisasi SIRAMAH, peningkatan PHBS, uji petik lab health award, pelaksanaan pameran, publikasi SMS Gateway, publikasi spanduk, banner, x-banner selebaran yang di cetak	195 orang, 117 orang, 72 kali, 40 orang, 1 paket 12 paket, 4 paket	195 orang, 117 orang, 72 kali, 40 orang, 1 paket 12 paket, 4 paket	100
6.3	Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	1.637.154.000	1.415.970.900	99,97	DAK Non Fisik	Terlaksananya rapat koordinasi dana BOK, kampanye PHBS, pemeriksaan mikrobiologi kualitas air ukm sekunder	5 paket, 3 paket, 16 sampel, 32 sampel	5 paket, 3 paket, 16 sampel, 32 sampel	100
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>665.500.000</b>	<b>500.564.525</b>	<b>75,22</b>					
7.1	Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat	395.500.000	328.592.50	83,08	DAU DAK DID Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas sanitasi di msyarakat, lokasi lomba pasars ehat, pembinaan kaderkesling ponpes, pembinaan hygiene sanitasi pedagang makanan, desa yang dilaksanakan pemicuan perubahan perilaku di masyarakat	9 paket, 6 pasar, 4 ponpes, 3 pasar, 20 desa	8 paket, 5 pasar, 4 ponpes, 3 pasar, 17 desa	90
7.2	Peningkatan Kualitas Air Bersih Masyarakat	120.000.000	85.819.000	71,52	PAD	Terlaksananya pembinaan teknik pengawasan kualitas air pada HIPPAM, lokasi uji petik air PDAM, uji petik air bersih HIPPAM, lokasi uji petik air bersih SAB, uji petik air bersih	7 kali, 14 lokasi, 20 lokasi, 17 lokasi, 10 lokasi, 30 orang, 15 lokasi, 15 lokasi	7 kali, 14 lokasi, 20 lokasi, 17 lokasi, 10 lokasi, 30 orang, 15 lokasi, 15 lokasi	100



RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

						DAM, pembinaan pengelola depot air minum isi ulang, lokasi pemeriksaan sampel mikrobiologi dan kimi air depot air minum			
7.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.000.000	25.022.975	33,36	DID	Terlaksananya diseminasi kesehatan dan keselamatan kerja, monev K3 di perusahaan, diseminasi keolahragaan pada masyarakat	40 orang, 75 perusahaan, 40 orang	40 orang, 30 perusahaan, 40 orang	40,1
7.4	Peningkatan Kelembagaan Forum Kabupaten Sehat	75.000.000	61.130.000	81,51	PAD	Terlaksananya pembinaan dan monev ke forum kecamatan sehat	10 kecamatan	10 Lembaga	100
<b>8</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>1.410.277.200</b>	<b>87,05</b>					
8.1	Peningkatan Imunisasi	185.000.000	176.553.000	95,43	Pajak Rokok	Terlaksananya rapat koordinasi pengelola program, pertemuan teknis imunisasi bagi tenaga kesehatan, pertemuan audit kasus KIPI, sosialisasi vaksin MR	4 kali, 4 kali, 30 orang, 33 orang	4 kali, 4 kali, 30 orang, 33 orang	100
8.2	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	110.000.000	103.825.000	94,39	Pajak Rokok	Terlaksananya pertemuan petugas pengelola PPTM puskesmas, pertemuan koordinasi lintas sektor, sosialisasi pembentukan posbindu PTM di sekolah, pembekalan teknis bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam upaya implementasi KTR dan UBM di sekolah	4 kali, 56 orang, 85 orang, 33 orang	4 kali, 56 orang, 85 orang, 33 orang	100
8.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	90.000.000	89,680,450	99,64	Pajak Rokok	Terlaksananya pengelola program keswa dan promkes, rakontek petugas pengelola kesehatan jiwa, audit penanganan kasus kesehatan jiwa, pertemuan validasi data kasus ODGJ, monev kasus ODGJ	33 orang, 33 orang, 60 orang 2 kali, 19 lokasi	33 orang, 33 orang, 60 orang 2 kali, 19 lokasi	100
8.4	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.000.000.000	817.298.800	81,73	Pajak Rokok	Terlaksananya koordinasi pengelola program puskesmas, pelaksanaan ICF kepulauan Gili, sero survey rutan kraksaan, lokasi fogging kasus DBD, penyediaan BHP pendukung pemeriksaan penyakit menular	7 paket, 150 orang, 125 sampel, 105 kasus, 4 paket, 4 kali, 4 kali, 30 orang, 33 orang	7 paket, 150 orang, 125 sampel, 105 kasus, 4 paket, 4 kali, 4 kali, 30 orang, 33 orang	100
8.5	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	115.000.000	103,183,100	89,72	Pajak Rokok	Terlaksananya koordinator dan evaluasi surveilans puskesmas, pertemuan teknis petugas lab. Kasus KLB, pertemuan teknis petugas pengelola EWARS, pertemuan RHA bagi petugas puskesmas (pkm rawan bencana)	9 kegiatan, 46 orang, 45 orang, 40 orang	9 kegiatan, 46 orang, 45 orang, 40 orang	100
8.6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji	120.000.000	119.736.250	99,78	PAD dan Pajak Rokok	Terlaksananya pertemuan teknis tim pemeriksaan kesehatan, pertemuan koordinasi bagi lintas	3 kali, 78 orang, 33 orang, 33 orang, 3 kali	3 kali, 78 orang, 33 orang, 33 orang, 3 kali	100



RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

						sektor dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan haji, pertemuan teknis aplikasi siskohatkes, pertemuan teknis pelacakan K3JH, pengambilan vaksin ke dinkes provinsi			
<b>9</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1.499.000.000</b>	<b>1.372.366.442</b>	<b>91,55</b>					
9.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	1.312.000.000	1.239.014.992	94,44	Pajak Rokok	Terlaksananya pembinaan perawat Ponkesdes, validasi program PERKESMAS, pembinaan perawat supervisor, sosialisasi akreditasi FKTP Swasta, pembekalan petugas P3K KASADA, pemantapan akreditasi untuk pemegang program dinas kesehatan, penilaian akreditasi, PKPUS di Puskesmas, Supervisi Yandas dan Ponkesdes, 3 PONKESDES (Wilayah Barat, Tengah dan Timur), pendampingan Tim Penilai, sarpras pendukung P3K yang tersedia, Self Assesment (SA)	59 orang 21 orang, 43 orang, 20 orang, 50 orang, 46 orang, 299 orang, 33 orang, 4 kali, 4 kali, 1 kali, 3 paket, 17 kali	59 orang 21 orang, 43 orang, 20 orang, 50 orang, 46 orang, 299 orang, 33 orang, 4 kali, 4 kali, 1 kali, 3 paket, 17 kali	100
9.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000	43.364.500	86,73	Pajak Rokok	Terlaksananya pertemuan koordinasi sistem rujukan, supervisi terpadu (dinkes dan provesi), isitasi perijinan	60 orang, 10 kali, 4 kali	60 orang, 10 kali, 4 kali	100
9.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	50.000.000	48.822.500	97,65	Pajak Rokok	Terlaksananya pemantapan basic data pelayanan tradisional, sosialisasi pelayanan kesehatan tradisional, pembinaan pelaku pelayanan kesehatan tradisional, lokasi visitasi pelayanan kesehatan tradisional	66 orang, 54 orang, 48 orang, 24 kecamatan	66 orang, 54 orang, 48 orang, 24 kecamatan	100
9.4	Peningkatan Manajemen Pelayanan JKN	87.000.000	41.164.750	47,32	PAD	Terlaksananya rekonsiliasi keuangan dana JKN puskesmas, pembayaran gaji tenaga pendukung administrasi JKN di Dinkes	33 puskesmas, 5 orang	33 pkm, 5 org,	100
<b>10</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>1.658.728.500</b>	<b>1.630.538.552</b>	<b>98,42</b>					
10.1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah	1.658.728.500	1.630.538.552	98,42	DAU	Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda bagi petugas Puskesmas, tenaga verifikator jamkesmasda di Dinkes, puskesmas yang melayani perawatan dan pengobatan penduduk miskin, validasi Jamkesda	72 orang, 12 orang, 33 puskesmas, 36 orang	33 pkm, 2500 org/12 bln	100
<b>11</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan,</b>	<b>7.239.805.000</b>	<b>7.173.220.700</b>	<b>99,08</b>					



	<b>Perbaikan sarpras puskesmas, pustu dan jaringannya</b>								
11.1	Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas Pembantu	7.239.805.000	7.173.220.700	99,08	DAK DAU	Terlaksananya puskesmas yang direhab	5 lokasi	5 lokasi	100
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>246.743.700</b>	<b>98,70</b>					
12.1	Peningkatan Kapasitas Fungsional Tenaga Kesehatan	237.000.000	230.515.500.	97,26	Pajak Rokok	Terlaksananya pelatihan fungsional tenaga kesehatan	6 paket	7 paket	88
12.1	Peningkatan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	24.000.000	15.851.750	66,05	Pajak Rokok	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perijinan tenaga kesehatan	240 kali	200 kali	83,3
12.2	Pengembangan Puskesmas	252.200.000	237.000.000	93,97	DAU BAN PROP	Terlaksananya pembayaran gaji dokter umum di Puskesmas PLUS dan standar	7 org	7 org	100
12.3	Pengembangan Ponkesdes	3.424.500.000	3.351.750.000	97,88	DAU BAN PROP	Terlaksananya pembayaran gaji tenaga perawat ponkesdes di Kab. Probolinggo	170 orang	170 Orang	100
<b>13</b>	<b>Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>	<b>1.643.270.000</b>	<b>1.473.698.746</b>	<b>88,78</b>					
13.1	Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan	140.000.000	137.111.750	97,94	PAD	Terlaksananya peserta rapat Rakorkesda, dokumen DHA, Sakip, Lakip, LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, rapat evaluasi capaian kegiatan tribulanan/evaluasi renja	150 orang, 6 dokumen, 125 orang	33 pkm/2 kl, 230 org, 11 pkm, 1 paket	100
13.2	Pengelolaan data, informasi dan Inovasi Kesehatan	1.035.600.000	724.833.722	69,99	Pajak Rokok	Terlaksananya dokumen Profil dan Selayang Pandang, tenaga admin server, langganan internet, sosialisasi hasil pengembangan/penelitian kesehatan, Pengembangan Inovasi kesehatan, pembelian server	2 paket, 2 orang, 12 bulan, 84 orang, 13 orang, 71 orang, 1 paket	2 paket/12 bulan, 176 buku, 3 paket dan 3 paket	80
13.3	Peningkatan Pelayanan UPTD IFK	399.299.000	337.243.588	84,47	PAD dan DAK Non Fisik	Terlaksananya paket bahan repacking obat, rapat koordinasi obat, pembayaran operasional IFK, Pemeliharaan bangunan IFK, pemeliharaan sarpras kantor	4 paket, 5 paket, 5 paket, 1 paket, 8 paket	33 pkm, 1 paket	100
13.4	Peningkatan Pelayanan UPTD Labkesda	141.920.000	138.725.021	97,75	PAD	Terlaksananya pembayaran operasional Labkesda, penyediaan reagen Lab, peningkatan kapasitas petugas lab, pemeliharaan alat kesehatan, perbaikan gedung Labkesda	4 paket, 1 paket, 2 paket, 2 paket, 1 paket	, 1 paket, 1 unit, 1 unit, 1 paket, 1 paket	100
13.5	Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	12.664.508.478	11.552.160.694	91,22	PAD	Terlaksananya puskesmas dengan pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan	33 puskesmas	33 pkm	100
13.6	Peningkatan Pelayanan Prolanis Puskesmas	200.000.000	198.184.398	99,09	PAD	Terlaksananya Pelayanan Prolaanis di Puskesmas	33 puskesmas	33 puskesmas	100
<b>14</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri</b>	<b>9.497.988.500</b>	<b>10.414.411.650</b>	<b>99,02</b>					



<b>Hasil Tembakau</b>									
14.1	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	9.314.427.465	9.190.717.000	98,67	DBHC HT	Terlaksananya rehab puskesmas, relokasi puskesmas, penyediaan alkes dan rehab pustu untuk melayani masyarakat	5 unit, 2 unit, 1 paket, 2 unit	5 unit, 2 unit, 1 paket, 2 unit	100
<b>15</b>	<b>Program Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP</b>	<b>56.624.821.116</b>	<b>44.629.195.823</b>	<b>78,82</b>					
15.1	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sukapura	844.066.335	689.421.160	81,68	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber	1.161.187.140	917.854.259	79,04	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.3	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan	1.866.104.880	1.530.995.809	82,04	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.4	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran	1.710.609.085	2.142.227.285	79,03	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.5	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Leces	2.195.848.926	1.901.282.950	86,59	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.6	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jorong	821.175.475	698.566.282	85,07	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.7	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tegalsiwalan	1.559.629.708	1.335.512.440	85,63	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.8	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Banyuanyar	1.493.089.325	1.303.423.528	87,30	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.9	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang Kidul	950.896.701	662.148.561	69,93	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.10	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris	1.728.074.825	1.069.924.863	61,91	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.11	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Ranugedang	1.695.718.630	1.335.118.675	83,15	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.12	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil	3.625.324.135	2716.608.497	74,93	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.13	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal	1.456.076.830	1.188.337.659	81,61	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.1	Kapitasi Jaminan	1.147.065.898	984.280.757	85,81	JKN	Terlaksananya	12 bln	12 bln	100



## RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

4	Kesehatan Nasional di FKTP Condong					pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas			
15.1 5	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pakuniran	1.195.687.215	1.02.053.514	85,39	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.1 6	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah	807.529.150	626.061.585	77,53	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.1 7	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar	1.805.446.511	1.335.072.461	73,95	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.1 8	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Paiton	1.689.010.939	1.474.957.154	87,33	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.1 9	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir	984.629.684	782.034.156	79,42	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 0	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk	1.252.450.680	948.550.740	75,74	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 1	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bago	1.009.788.462	807.886.220	80,01	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 2	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan	3.179.141.706	1.941.384.880	61,07	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 3	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan	2.407.586.338	1.935.788.030	80,40	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 4	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan	1.682.094.860	1.237.150.941	73,55	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 5	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Maron	3.215.964.488	2.412.160.223	75,01	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 6	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Suko	382.565.622	343.911.497	89,90	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 7	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Gending	2.146.659.181	1.861.608.999	86,72	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 8	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Dringu	1.965.317.694	1.683.769.279	85,67	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.2 9	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di	1.539.366.647	1.297.122.285	84,26	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa	12 bln	12 bln	100



RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

	FKTP Wonomerto					elayanan rawat jalan JKN di puskesmas			
15.30	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Lumbang	2.186.854.040	1.571.940.086	71,88	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.31	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tongas	1.597.103.416	1.404.714.477	87,95	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.32	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Curahtulis	1.305.344.056	1.178.412.074	90,28	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
15.33	Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumberasih	3.107.412.534	2.289.914.497	73,69	JKN	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan rawat jalan JKN di puskesmas	12 bln	12 bln	100
<b>16</b>	<b>Program Bantuan Operasional Kesehatan</b>	<b>7.537.860.000</b>	<b>6.682.355.550</b>	<b>88,65</b>					
16.1	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sukapura	200.620.000	152.317.000	75,92	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	80
16.2	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sumber	219.700.000	203.768.050	92,75	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.3	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kuripan	199.070.000	162.485.000	81,62	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	80
16.4	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bantaran	276.114.000	256.620.200	92,94	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.5	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Leces	241.675.000	23.325.000	96,54	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.6	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Jorong	135.618.000	135.408.000	99,85	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.7	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tegalsiwalan	221.090.000	182.930.000	82,74	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	85
16.8	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Banyuanyar	225.955.000	209.160.000	92,57	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.9	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Klenang Kidul	202.827.000	199.572.000	98,40	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.10	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tiris	256.740.000	174.396.200	67,93	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	75
16.11	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Ranugedang	243.259.000	209.885.000	86,28	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	90
16.12	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Krucil	289.562.000	224.628.000	77,58	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	85
16.1	Program Bantuan	254.048.000	181.248.000	71,34	DAK	Terlaksananya	12 bln	12 bln	75



## RENJA DINAS KESEHATAN KAB PROBOLINGGO TAHUN 2020

3	Operasional Kesehatan di Puskesmas Wangkal				Non Fisik	kegiatan promotif dan preventif di puskesmas			
16.1 4	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Condong	208.541.000	188.170.000	90,23	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	95
16.1 5	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pakuniran	217.166.000	195.623.500	90,08	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	95
16.1 6	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Glagah	156.511.000	147.996.000	94,56	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.1 7	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kotaanyar	221.289.000	212.351.000	95,96	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.1 8	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Paiton	258.809.000	254.229.000	98,23	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.1 9	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Jabungsisir	184.568.000	175.168.000	94,91	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.2 0	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Besuk	200.846.000	181.231.900	90,23	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	95
16.2 1	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bago	167.300.000	157.410.000	94,09	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.2 2	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kraksaan	319.069.000	274.144.000	85,92	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	90
16.2 3	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Krejengan	238.826.000	225.381.000	94,37	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.2 4	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pajarakan	224.499.000	204.249.000	90,98	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	95
16.2 5	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Maron	286.773.000	211.662.000	73,81	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	80
16.2 6	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Suko	155.231.000	119.456.200	76,95	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	85
16.2 7	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Gending	258.704.000	248.809.000	96,18	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.2 8	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Dringu	278.525.000	278.525.000	100,00	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.2 9	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wonomerto	247.205.000	180.617.500	73,06	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	80
16.3 0	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lumbang	231.307.000	215.932.000	93,35	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.3 1	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tongas	206.467.000	204.947.000	99,26	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100
16.3	Program Bantuan	196.421.000	192.371.000	97,94	DAK	Terlaksananya	12 bln	12 bln	100





2	Operasional Kesehatan di Puskesmas Curah Tulis				Non Fisik	kegiatan promotif dan preventif di puskesmas			
16.3 3	Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sumberasih	313.525.000	288.340.000	91,97	DAK Non Fisik	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas	12 bln	12 bln	100

Dari tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2018 baik berupa capaian kinerja maupun capaian keuangan mencapai 90,95%.

Beberapa program dan kegiatan yang capaian kinerja maupun keuangannya belum mencapai target yang telah ditetapkan atau dibawah 75% disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun realisasi sebesar 71,78% dikarenakan penyesuaian gaji tenaga Akuntansi untuk Dinas Kesehatan dari yang semula sebanyak 2 orang dengan lulusan S1 Akuntansi ternyata sebanyak 1 orang lulusan S1 Akuntansi dan 1 orang lulusan D3 Akuntansi.
- Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat realisasi sebesar 71,90 % dikarenakan adanya penambahan bahan perbaikan gizi dari Pemerintah Pusat.
- Kegiatan Jaminan Persalinan Puskesmas realisasi sebesar 26,19%, hal ini dikarenakan Jampersal adalah kegiatan baru dan belum tersosialisasinya dengan masiv serta juknis belum ada.
- Kegiatan Peningkatan kualitas air bersih masyarakat realisasi anggaran sebesar 71,52%, hal tersebut di karenakan adanya kegiatan lain dari OPD terkait.
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga realisasi anggaran sebesar 33,36, hal tersebut karena program baru dan membutuhkan pematapan SDM.
- Kegiatan Peningkatan manajemen Pelayanan JKN realisasi anggaran sebesar 47,32%, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut di integrasikan dengan pertemuan sejenis.
- Kegiatan Peningkatan Tenaga Kesehatan di Fasyankes realisasi anggaran sebesar 66,05%, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi tenaga kesehatan di dalam pengurus perizinan.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumber realisasi sebesar 69,63% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris realisasi sebesar 79,04% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kuripan realisasi sebesar 82,04% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bantaran realisasi sebesar 79,03% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Klenang Kidul realisasi sebesar 69,93% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Tiris realisasi sebesar 61,91% dikarenakan



penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.

- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krucil realisasi sebesar 74, 93% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- 
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Wangkal realisasi sebesar 81,61% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Glagah realisasi sebesar 77,53% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krotaanyar realisasi sebesar 73,95% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kotaanyar realisasi sebesar 73,95% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Jabungsisir realisasi sebesar 79,42% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Besuk realisasi sebesar 75,74% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Bago realisasi sebesar 80,01% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Kraksaan realisasi sebesar 61,07% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Krejengan realisasi sebesar 80,40% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Pajarakan realisasi sebesar 73,55% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Maron realisasi sebesar 75,01% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Lumbang realisasi sebesar 71,88% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Sumberasih realisasi sebesar 73,69% dikarenakan penyesuaian penyerapan JKN sesuai dengan tranfer BPJS ke puskesmas.
- Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tiris realisasi sebesar 67,93% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wangkal realisasi sebesar 71,34% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Maron realisasi sebesar 73,81% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wonomerto realisasi sebesar 73,06%



- dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas
- Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kuripan realisasi sebesar 81,62% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas.
  - Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sukapura realisasi sebesar 75,92% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas.
  - Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tegalsiwalan realisasi sebesar 82,74% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas.
  - Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Krucil realisasi sebesar 77,58% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas
  - Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Suko realisasi sebesar 76,95% dikarenakan penyesuaian kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas

Kegiatan-kegiatan tersebut belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, diharapkan dapat dilakukan evaluasi baik itu dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, sehingga di tahun berikutnya, program dan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara optimal.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Masing-masing misi yang diemban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai tujuan berkaitan dengan upaya merealisasikan harapan-harapan yang tersirat dalam visi. Adapun tujuan tersebut bersifat memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikan-perbaikan/harapan yang ingin dicapai lebih terfokus sesuai dengan tugas dan fungsís masing-masing.

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu penyelenggara pembangunan kesehatan memiliki tujuan yang tertuang dalam renstra 2013-2018 yaitu " Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat". Peningkatan Kualitas kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat di tunda lagi dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas bukan semata pengadaan alat – alat kesehatan ( sarana/prasaran ) yang baru tapi juga peningkatan SDM guna peningkatan Usia Harapan Hidup.

Hasil dari penjabaran tujuan tersebut yang merupakan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo, antara lain:

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit serta masalah kesehatan.

Strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan



sasaran tersebut, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, antara lain:

- a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan kualitas air bersih, sanitasi dasar dan kualitas kesehatan lingkungan;
- c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila;
- d. Peningkatan mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;
- e. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- f. Pengembangan sistem pembiayaan bagi masyarakat di puskesmas dan jaringannya;
- g. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat;
- h. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit serta kewaspadaan dini dalam penanggulangan kesehatan;

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan didasarkan pada target yang telah disusun sesuai indikator kinerja utama pada RPJMD Kab. Probolinggo periode 2018-2023 sebagai dasar penetapan target kinerja Renstra 2018-2023, RKPD 2019 serta Renja-OPD 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2018 berdasarkan hasil Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	28 %	22,09%
		Persentase UKBM Aktif	52 %	49%
		Persentase Desa/Kelurahan siaga aktif minimal strata madya	10 %	8,2%
2.	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio fasilitas pelayanan kesehatan dasar	30 per 100.000 penduduk	26,8 per 100.000 penduduk
		Presentase masyarakat yang tercover Jaminan Kesehatan Nasional	52 %	51,22%
		Presentase masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar (contact rate)	12 %	8,9%



		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	20 %	17,83%
3.	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyakit serta Masalah Kesehatan	Case Fatality Rate penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3i)	20 %	15,2%
		Presentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dan dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	100%
		Case Fatality Rate penyakit menular	20 %	12,45%
		Prevalensi penyakit tidak menular	20 %	16,78%
		Prevalensi Balita Stunting	15 %	14,50%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	100 per 100.000 Kelahiran Hidup	119.8 per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	12 per 1000 Kelahiran Hidup	11.45 per 100 Kelahiran Hidup

Dari tabel lampiran tersebut, ada beberapa capaian di tahun 2018 yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, secara garis besar capaian kinerja Dinas Kesehatan di tahun 2018 rata-rata capaiannya diatas 80% atau secara skala ordinal capaian kinerja sudah baik, bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya diatas 100% (sangat baik).. Sedangkan indikator lainnya memiliki capaian kinerja yang cukup meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Melalui analisa faktor-faktor penyebab belum tercapainya target tersebut, maka diharapkan dapat dilakukan perencanaan yang lebih terarah sehingga pencapaian kinerja pada periode renstra tahun berikutnya dapat meningkat.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi dalam :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam rangka upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM);
2. Pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan sistem informasi kesehatan (SIK),
3. Pemberian ijin dan rekomendasi perijinan dibidang kesehatan,



4. Pembinaan terhadap UPTD kesehatan,
5. Pengkoordinasian dengan instansi terkait, lembaga swasta dan kemasyarakatan dibidang kesehatan,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraannya, antara lain:

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 adalah 61,7 tahun dan tahun 2018 meningkat sebesar 0,17 menjadi 61,87 tahun. Apabila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 70,09 tahun dan rata-rata AHH penduduk Indonesia yang sebesar 72 tahun, AHH di Kabupaten Probolinggo masih jauh berada dibawah taraf provinsi dan nasional. AHH di Kabupaten Probolinggo di tahun 2011-2013 bahkan berada di urutan terbawah dibandingkan 38 kab/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.
- b. Angka kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di Kabupaten Probolinggo. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut secara implisit adalah "3 Terlambat" (Terlambat mengambil keputusan merujuk ke fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan Terlambat mendapat pelayanan Tenaga kesehatan). Sedangkan faktor penyumbang angka kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR, kelainan kongenital, asfiksia, aspirasi dan pneumonia.
- c. Status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab gizi merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi masyarakat di Kabupaten Probolinggo masih cukup memprihatinkan, ditandai dengan penemuan balita gizi kurang dan balita gizi buruk di beberapa kecamatan dan sekitar 14 kecamatan termasuk dalam kategori kecamatan rawan pangan.
- d. Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama belum adanya sistem monitoring yang efektif dalam mengukur kemandirian suatu masyarakat untuk hidup sehat;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- f. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.

Permasalahan yang diuraikan tersebut membutuhkan penanganan yang komprehensif baik dari lintas program maupun lintas sektor. Melalui keterpaduan program dan kegiatan antar SKPD disertai dengan proses perencanaan dan koordinasi yang tepat, maka diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi secara bertahap sehingga tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Secara nasional, indikator kinerja juga didasarkan pada pencapaian SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Kepmenkes RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2018**

	<b>PELAKSANAAN SPM/INDIKATOR</b>	<b>Sasaran SPM</b>	<b>Realisasi SPM</b>	<b>(%)</b>
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	19.207	16.808	87,51
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	18.334	17.864	97,44
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	17.461	17.280	98,96
4	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86.972	78.947	90,77
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	36.063	21.331	59,15
6	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	564.484	106.004	18,78
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	141.718	99.208	70,00
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	193.183	86.190	44,62
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	61.711	40.102	64,98
10	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	16.540	16.540	100,00
11	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.699	1.699	100,00
12	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	11.045	11.045	100,00



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok atau organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo di tahun 2019 memiliki target pencapaian indikator kinerja utama sesuai dengan indikator pada RPJMD dan Renstra 2013-2018. Target tersebut antara lain:

**Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan	Angka Kematian Ibu ( AKI )	100/100000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Neonatal/Bayi ( AKIB )	13/ 1000 Kelahiran Hidup
		Desa IDL ( Imunisasi Dasar Lengkap )	93 %
		Stunting	22 %
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Rumah Tangga Sehat	24,5%
3	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi</i>	65 %
		<i>Masyarakat yang tercover JKN</i>	83 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	SATUAN
Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pemberdayaan Masyarakat Ke Arah Kemandirian	Meningkatnya cakupan desa siaga aktif	79	%
	Meningkatnya jumlah Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	23	%
Meningkatnya Kualitas Air Bersih, Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman serta Kualitas Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat	61	%





Menurunkan Angka Kesakitan Dan Kematian Akibat Penyakit Serta Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini Dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan Dengan Pengembangan Kebijakan Bidang Kesehatan Dan Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH)	61.98	tahun
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	87	per 100.000 KH
	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	17	per 1000 KH
Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunkan prevalensi gizi buruk	<5	%
	Menurunkan prevalensi gizi kurang	<15	%
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan serta Pembiayaan di Puskesmas dan Jaringannya	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan	54	%



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Dalam konteks Rencana Strategis, tahapan penentuan program pada hakekatnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus penjabaran dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menetapkan program-program tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan Prasarana serta tata kelola keuangan, barang serta perencanaan yang terukur di dinas kesehatan, dengan kegiatan antara lain:
  - Pelayanan Administrasi Umum
  - Pelayanan Managemen Kepegawaian
  - Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
  - Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
2. Program Peningkatan Kesehaatan Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara umum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan penanganan masalah kesehatan, dengan kegitan antara lain:
  - Peningkatan kesehatan Keluarga dan Gizi
  - Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang bertujuan untuk mencegah, menekandan pengendaian penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidk menular, dengan kegiatan antara lain:
  - Peningkatan Surveilans dan Imunisasi
  - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatandan , bertujuan untuk meningkatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standart (Pelayanan dan Regulasi), dengan kegiatan antara lain:
  - Pelayanan Kesehatan Primer
  - Peningkatan Kesehatan Rujukan
  - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
  - Peningkatan Kesehatan Tradisional
  - Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
5. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya kesehatan di Kabupaten Probolinggo, dengan kegiatan antara lain:



- Peningkatan dan Pengembangan Kefarmasian
  - Peningkatan dan Pengembangan Alat Kesehatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Kesehatan (DBHCHT), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusia kesehatan serta meningkatkan kepersertaan masyarakat dalam program asuransi kesehatan dalam rangka UHC ( Universal Health Care ) dengan kegiatan antara lain:
- Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
  - Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/pembayaran iuran kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
  - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif
  - Pelatihan Tenaga Kesehatan/Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (Peningkatan Kapasitas Aparatur
7. Program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, dengan kegiatan antara lain:
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sukapura
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sumber
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kuripan
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bantaran
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leces
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jorong
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tegalsiwalan
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Banyuwang
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Klenang kidul
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tiris
  - Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Ranugedang



- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Krucil
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Wangkal
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Condong
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pakuniran
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Glagah
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kotaanyar
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Paiton
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jabungsisir
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Besuk
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bago
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kraksaan
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Krejengan
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pajarakan
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Maron
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Suko
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Gending
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Dringu
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Wonomerto
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Lumbang



- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tongas
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Curahtulis
- Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sumberasih

Program dan kegiatan diatas diusulkan untuk merepresentasikan upaya dalam pencapaian target bidang kesehatan, baik itu berdasarkan SDGs, SPM, RPJMN maupun RPJMD Kabupaten Probolinggo yang disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan dana pada tahun 2020. Diharapkan di tahun berikutnya, kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang telah dirumuskan, sehingga indikator dan pencapaian status kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo dapat meningkat.

Usulan program dan kegiatan di tahun 2020 beserta rencana pendanaan, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo Tahun 2020**

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL
	<b>URUSAN WAJIB KESEHATAN</b>	
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Pelayanan Administrasi Umum	4,000,000,000
2	Peayanan Manajemen Kepegawaian	12,763,742,400
3	Peantusahaan dan Pelaporan Keuangan	400,000,000
4	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program	250,000,000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>	
1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
2	Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	540,000,000
3	Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	539,500,000
<b>III</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>	
1	Peningkatan Surveilans dan Imunisasi	400,000,000
2	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular	400,000,000
3	Peningkatan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	200,000,000
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	
1	Pelayanan Kesehatan Primer	1,000,000,000
2	Peningkatan Kesehatan Rujukan	6,000,000,000
3	Peningkatan Kesehatan Tradisional	3,000,000,000
4	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	650,000,000



<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan</b>	
1	Peningkatan dan Pengembangan Kefarmasian	500,000,000
2	Peningkatan dan Pengembangan Alat Kesehatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	100,000,000
3	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200,000,000
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Kesehatan</b>	
1	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	14,666,361,188
2	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/pembayaran iuran kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.	15,291,933,747.50
3	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif	3,500,000,000
4	Pelatihan Tenaga Kesehatan/Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (Peningkatan Kapasitas Aparatur	2,500,00,000
<b>VII</b>	<b>Program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional</b>	<b>48,791,072,500</b>



## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai penjabaran Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang memuat program dan kegiatan tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan telah tersusunnya dokumen Ranwal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Probolinggo, Oktober 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**dr.H. ANANG BUDI Y, MMKes, MMRS**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 199703 1 004